

INDEKS GINI

KABUPATEN SIAK 2021



***DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIAK***



INDEKS GINI KABUPATEN SIAK 2021

Anggota Tim Penyusun:

Koordinator : Ari Setiadi Gunawan, B.St, SH

Editor : Neny Tri Mahanani, S.S.T, M.Ec.Dev.

Riswanti Ifdawalni Berutu, S.Tr.Stat

Penulis : Neny Tri Mahanani, S.S.T, M.Ec.Dev.

Pengolah Data : Riswanti Ifdawalni Berutu, S.Tr.Stat

Sri Siska Wirdaniyati, S.Stat.

Cover, *Lay Out* dan Infografis : Sri Siska Wirdaniyati, S.Stat.

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Gini Kabupaten Siak 2021 merupakan salah satu upaya untuk melengkapi tersedianya data statistik yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Siak.

Laporan ini menyajikan data Indeks Gini di Kabupaten Siak tahun 2021 dan ulasan-ulasan mengenai beberapa variabel sosial ekonomi lainnya seperti besaran pengeluaran perkapita, PDRB atas dasar harga berlaku dan lain-lain. Informasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah, bahan kajian para peneliti di bidang ekonomi dan pengguna data lainnya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam kegiatan ini. Selanjutnya untuk penyempurnaan laporan di masa mendatang, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pengguna data.

Siak, Desember 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Siak
Kepala

Romy Lesmana Dermawan, AP, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Manfaat	4
1.4 Sumber Data	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
II METODOLOGI	7
2.1. Konsep dan Definisi	7
2.2. Pengertian Ketimpangan	8
2.3. Teknik Penghitungan Ketimpangan	10
2.4. Garis Kemiskinan	15
III PEMBAHASAN	19
3.1 PDRB Per kapita	21
3.2 Pengeluaran Per Kapita	23
3.3 Pola Konsumsi	24
3.4 Kurva Lorenz	26
3.5 Indeks Gini	26
3.6 Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia	28
3.7 Garis Kemiskinan	29
IV PENUTUP	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.	PDRB Perkapita Kabupaten Siak, 2017 – 2021 (Juta Rupiah)	22
Tabel 2.	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Menurut Harga Berlaku, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021	22
Tabel 3.	Persentase Penduduk menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Siak, 2021.....	24
Tabel 4.	Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran di Kabupaten Siak, 2021	25
Tabel 5.	Indeks Gini dan Kriteria Tingkat Ketimpangan di Kabupaten Siak, 2019 – 2021	27
Tabel 6.	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Nasional, 2019 – 2021	27
Tabel 7.	Ketimpangan Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Siak, 2021	28
Tabel 8.	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, , dan di Kabupaten Siak, 2019 – 2021	29
Tabel 9.	Perbandingan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, P_1 , dan P_2 Kabupaten Siak dan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021 ...	31

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Kurva Lorenz	11
Gambar 2. PDRB Per Kapita Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2021	21
Gambar 3. Kurva Lorenz Kabupaten Siak, 2020 - 2021	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Siak adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Bengkalis. Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik. Struktur perekonomian Kabupaten Siak ditopang oleh tiga sektor lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pemerintah di bidang ekonomi, dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu target yang ditetapkan pemerintah. Selain target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan juga adanya peningkatan dan pemeratan tingkat pendapatan masyarakat.

Hipotesis Simon Kuznet menjelaskan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk atau tidak merata, namun pada tahap selanjutnya, saat pembangunan mulai menyentuh banyak aspek distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Teori inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal dalam distribusi pendapatan.

Pemerataan pembangunan masih menjadi sesuatu yang terus diupayakan perwujudannya oleh pemerintah. Tidak hanya berupa kesenjangan/ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita, akan tetapi juga kesenjangan dalam proses distribusinya. Bukan pula semata-mata berupa kesenjangan antar daerah (kota-desa, kecamatan, desa/kelurahan), akan tetapi juga berupa kesenjangan ekonomi dalam lapisan

masyarakat. Upaya untuk mengurangi kesenjangan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang harus dicapai, terlebih bagi pemerintah daerah yang saat ini perannya semakin strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal, karena adanya penguatan peran pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yang tengah berlangsung saat ini. Ketimpangan pendapatan dalam pembangunan dapat dilihat antara lain dengan menganalisis perbedaan yang cukup signifikan pada aspek-aspek ekonomi.

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah memberikan nuansa baru dalam pembangunan daerah. Setiap daerah berlomba meningkatkan daya saing daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan daerah. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan daerah yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila (Kartasmita, G, 1996).

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak rata-rata mencapai 1,14 persen selama periode 2017 - 2021. Selain laju pertumbuhan ekonomi, hal yang menjadi perhatian juga adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang sering dihadapi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Tidak meratanya distribusi pendapatan ini memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal munculnya masalah kemiskinan. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin lebar kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Bila kondisi seperti ini yang terjadi di suatu daerah, berarti pembangunan yang

dilaksanakan lebih berpihak kepada segelintir orang kaya, sedangkan orang miskin tidak menikmatinya.

Hal tersebut bisa juga disebabkan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, perbedaan akses dalam modal, dan perbedaan kondisi demografis antardaerah. Ketimpangan merupakan salah satu dari tiga masalah perekonomian dan menjadi tugas bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, ketimpangan dapat mempengaruhi perekonomian termasuk perubahan pola permintaan. Ketimpangan sering memicu kecemburuan sosial diberbagai daerah, yang pada akhirnya masyarakat akan rentan terhadap konflik. Selain itu ketimpangan yang tidak segera diatasi dapat menimbulkan kelompok miskin kronis sehingga memperlebar ketimpangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

PDRB dapat dikatakan sebagai salah satu ukuran kemakmuran suatu wilayah, sedangkan angka PDRB dibagi jumlah penduduk yang dikenal dengan PDRB per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang sering digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai tingkat kemakmuran masyarakat. Namun demikian, angka ini belum mencerminkan nilai yang benar-benar diperoleh oleh masyarakat (pendapatan per kapita).

Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Siak selama periode 2017-2021 mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuatif). PDRB per kapita atas dasar konstan di Kabupaten Siak pada tahun 2017 sebesar 111,79 juta rupiah, menurun menjadi 116,87 juta rupiah pada tahun 2021, atau meningkat sebesar 4,55 persen dibandingkan tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan terjadinya kenaikan nilai produksi secara riil dari proses seluruh aktifitas ekonomi di Kabupaten Siak.

Pertumbuhan secara signifikan terlihat juga dari data PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku. Pada tahun 2017, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 171,02 juta rupiah, naik menjadi 192,54 juta rupiah pada tahun 2021 atau tumbuh rata-rata 3,21 persen per tahun.

1.2 Maksud dan Tujuan

Indikator ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dalam kajian ini dibatasi pada ukuran ketimpangan distribusi pendapatan dengan ukuran kuantitatif yang digambarkan dalam Kurva Lorenz, Indeks Gini dan Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia. Ukuran-ukuran tersebut merupakan ukuran besar kecilnya bagian pendapatan yang diterima penduduk.

Publikasi ini bertujuan untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Siak pada tahun 2021. Selain itu, buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas kondisi kemiskinan penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2021.

1.3 Manfaat

Publikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana ketimpangan pendapatan di Kabupaten Siak. Indikator ketimpangan distribusi pendapatan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menelaah berbagai kemungkinan yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan ketimpangan dan kemiskinan. Publikasi ini juga dapat digunakan untuk menggali kebijakan alternatif yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di wilayahnya.

1.4 Sumber Data

Publikasi ini menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2021. Untuk mendapatkan data pendapatan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Ketersediaan dan keterbukaan rumah tangga untuk memberikan informasi yang sebenarnya masih kurang kooperatif, sehingga informasi pendapatan rumah tangga cenderung *under estimate*. Oleh karena itu, tingkat pendapatan rumah tangga yang digunakan dalam penghitungan indikator ketimpangan dalam publikasi ini didekati dengan total pengeluaran atau konsumsi rumah tangga (*Consumption approach*).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan, materi buku ini dibagi dalam empat bab yang meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang yang mendeskripsikan pendapat para pakar/pengamat ekonomi tentang permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dan kemiskinan, serta tujuan dan sistematika penulisan.
2. BAB II METODOLOGI, berisi tentang konsep dan definisi yang digunakan dan metodologi penghitungan.
3. BAB III PEMBAHASAN, merupakan inti dari publikasi, yang menganalisis hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk berdasarkan Kurva Lorenz, Indeks Gini, dan Ketimpangan Relatif (*Relative Inequality*) kriteria Bank Dunia serta membahas mengenai kemiskinan di Kabupaten Siak.
4. BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan atau ringkasan dari hasil analisis masing – masing metode pengukuran.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Konsep dan Definisi

Koefisien Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya, *Variabilità e mutabilità*. Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Dalam penyusunan publikasi ini ada beberapa konsep dan definisi yang digunakan:

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan, tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan ditanyakan untuk setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata – rata sebulan. Dalam penghitungan pengeluaran konsumsi makanan menggunakan 14 kelompok komoditi yaitu, Kelompok padi-padian; umbi-umbian; ikan/udang/cumi/kerang; daging; telur dan susu; sayur-sayuran; kacang-kacangan; buah-buahan; minyak dan kelapa; bahan minuman; bumbu-

bumbuan; bahan makanan lainnya; makanan dan minuman jadi; dan rokok dan tembakau. Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi bukan makanan menggunakan 6 kelompok komoditi yaitu Kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka barang dan jasa; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; barang tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; dan keperluan pesta dan upacara/kenduri.

PDRB per kapita sebagai *proxy* dari pendapatan per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing – masing penduduk akibat dan adanya aktivitas produksi. Sedangkan Produk Domestik Regional Neto (PDRN) per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai akibat dari keikutsertaannya dalam proses produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB/PDRN dengan jumlah penduduk. Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah.

2.2 Pengertian Ketimpangan

Ketimpangan dalam hal pembangunan terkait erat dengan ketimpangan regional. Istilah ini menunjukkan perbedaan dalam tingkat pencapaian ekonomi dan kesejahteraan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain. Struktur disparitas suatu wilayah dibagi menjadi tiga bidang utama: a. Kesenjangan Fisik. Terkait dengan kondisi lingkungan dan geografis yang dimiliki suatu wilayah tertentu. b. Kesenjangan Ekonomi. Terkait dengan perbedaan suatu daerah dalam kualitas dan kuantitas. Penilaian biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator nilai tambah dari produksi yang dihasilkan, yang dikombinasikan dengan analisis pendapatan pajak, pertumbuhan industri, tren demografis, infrastruktur dan layanan. c. Kesenjangan Sosial.

Ketimpangan dapat diterjemahkan sebagai gap antara yang tertinggi dengan yang terendah. Dalam konteks ekonomi, aspek keadilan dan pemerataan selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah (Raksaka Mahi, 2000).

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat seperti :

Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean Independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.

Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*Population Size Independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris Paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.

Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi kriteria ini.

Pembangunan yang seimbang (tidak menimbulkan ketimpangan) dapat dilihat pada keuntungan yang akan diperoleh dari terciptanya interdependensi yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor industri, maupun antara sektor internal dan sektor eksternal. Ketika pembangunan hanya difokuskan pada satu sektor saja maka akan menimbulkan banyak masalah karena akan menimbulkan ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi yang menyebabkan terlambatnya proses pembangunan.

Wilayah sedang berkembang perlu melaksanakan program pembangunan seimbang dengan harapan bahwa pasar dapat diperluas. Pembangunan suatu industri akan menciptakan pasar bagi industri lain yang menyebabkan semakin luas pasar industri tersebut. Dengan demikian maka akan memungkinkan penggunaan modal secara lebih efisien dan intensif sehingga dapat merangsang perluasan permintaan akan modal dan keinginan untuk melakukan investasi lebih banyak.

2.3 Teknik Penghitungan Ketimpangan

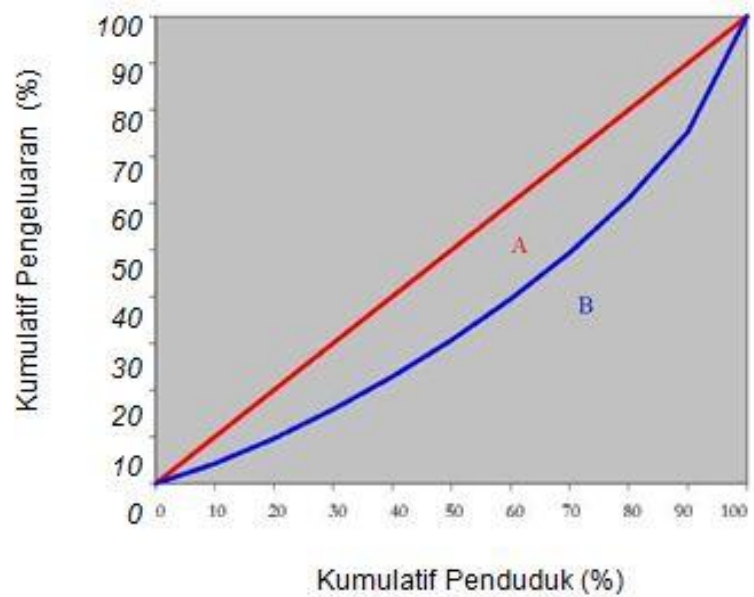
Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal. Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuan ini selanjutnya dikenal sebagai Pareto Law, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Pada publikasi ini disajikan tiga alat ukur yakni Kurva Lorenz, Indeks Gini, dan Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia.

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz diambil dari nama Conrad Lorenz, seorang ahli statistik Amerika yang pada tahun 1905 menemukan diagram yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan menurut kelompok-kelompok penduduk yang juga dihitung secara kumulatif. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujursangkar dimana sisi vertikal melambangkan persentase kumulatif pendapatan dan sisi horisontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan (Dumairy, 1996).

Gambar 1. Kurva Lorenz



Penentuan tingkat ketimpangan berdasarkan Kurva Lorenz dilihat dari jarak kurva ke garis diagonal. Kurva Lorenz yang semakin dekat dengan diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.

Pembuatan Kurva Lorenz dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga terbesar.
2. Menentukan desil pertama hingga ke-sepuluh pada distribusi data pendapatan.
3. Menghitung besarnya nilai pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
4. Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
5. Menghitung persentase kumulatif pendapatan dari masing-masing desil.
6. Memetakan dalam plot dua dimensi antara masing-masing desil sebagai sisi horisontal dengan nilai persentase kumulatif pendapatan pada sisi vertikal.

b. Indeks Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Indeks Gini. Ide dasar penghitungan Indeks Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas Kurva

Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan atau rasio antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah dibawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Indeks Gini. Secara matematis, untuk menghitung Indeks Gini dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_0^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan :

P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i

k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai Indeks Gini semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah, nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat, dan nilai lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi.

Secara ringkas penghitungan Indeks Gini adalah sebagai berikut :

1. Membuat kelas pengeluaran penduduk berdasarkan data Susenas, diisikan pada kolom (1).
2. Menghitung jumlah penduduk menurut kelompok pengeluaran dan diisikan pada kolom (2).
3. Menghitung persentase jumlah penduduk dan diisikan pada kolom(3).
4. Menghitung nilai pendapatan penduduk pada masing – masing kelompok pengeluaran dan diisikan pada kolom (4).
5. Menentukan kumulatif pendapatan hingga kelas ke-i dan diisikan pada kolom (5).

6. Menghitung persentase kumulatif pendapatan dan diisikan pada kolom (6).
7. Menambahkan kumulatif pendapatan pada kelompok pengeluaran ke-i dengan kelompok pengeluaran ke-(i-1) dan diisikan pada kolom (7).
8. Mengalikan nilai pada kolom (3) dengan kolom (7) dan diperoleh nilai pada kolom (8).
9. Menjumlahkan seluruh nilai pada kolom (8).
10. Nilai Indeks Gini diperoleh dengan mengurangi angka satu dengan nilai penghitungan pada langkah ke-9.

c. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil penghitungan Indeks Gini barulah menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Sejauh mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian Bank Dunia (*World Bank*) dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex mengembangkan suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketimpangan (*Inequality*) melalui indikator yang disebut ketimpangan relatif (*Relative inequality*) Kriteria Bank Dunia. Ketimpangan relatif diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat.

Ketimpangan relatif didasari dengan adanya teori kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif dihitung dengan standar minimum yang disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita” (BPS, 2008).

Bank Dunia mengelompokkan penduduk pada tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, indikator kesenjangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40 persen dari penduduk yang berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan menjadi:

- a. Tingkat ketimpangan tinggi (*Hight Inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen.
- b. Tingkat ketimpangan sedang (*Moderat Inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen.
- c. Tingkat ketimpangan rendah (*Low Inequality*), bila proporsi pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah (40 persen penduduk berpenghasilan menengah) dan atas (20 persen penduduk berpenghasilan tinggi) tidaklah diperhatikan. Seandainya ada perubahan penerimaan pendapatan pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah dan atas, tidak akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia ini.

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan ukuran ketimpangan pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah sebagai berikut:

1. Mengurutkan data pengeluaran dari terkecil hingga terbesar.
2. Menentukan nilai desil ke-4 dan ke-8 pada distribusi pengeluaran.

3. Nilai pengeluaran yang kurang desil ke-4 dikelompokkan sebagai penduduk berpendapatan rendah, nilai antara desil ke-4 hingga ke-8 masuk pada kelompok moderat, dan nilai pengeluaran diatas desil ke-8 masuk dalam kelompok berpendapatan tinggi.
4. Menghitung jumlah penduduk dan nilai pengeluaran pada masing-masing kelompok sebagaimana pada langkah ke-3.
5. Menghitung persentase pendapatan pada masing-masing kelompok.
6. Menentukan tingkat ketimpangan berdasarkan Kriteria Bank Dunia yang difokuskan pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

2.4 Garis Kemiskinan

Konsep “garis kemiskinan” (*Poverty Line*) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Penduduk akan berada dibawah garis kemiskinan (*Absolute Poverty*) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Ada dua pendekatan utama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu pendekatan pendapatan/pengeluaran dan pendekatan dengan memasukkan komponen-komponen sosial. Pendekatan pendapatan/pengeluaran dihitung berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Sedangkan pendekatan kedua dilakukan karena banyak faktor yang mempengaruhi sulitnya mendefinisikan dari sisi pendapatan/pengeluaran. Beberapa indikator sosial yang dipakai sebagai indikator atau tolak ukur kemiskinan antara lain: Usia harapan hidup (*life expectancy*), kematian bayi, asupan gizi, proporsi pendapatan yang dipakai untuk membeli makanan, tingkat pendidikan, akses kesehatan, dan ketersediaan serta kebersihan air minum.

Pendekatan pengukuran kemiskinan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saat ini Bank Dunia menggunakan dua ukuran, yaitu US \$1 per kapita per hari dan US \$2 per kapita per hari. US dollar yang digunakan adalah US dollar kekuatan daya beli

(*purchasing power parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan menggunakan data SUSENAS. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan, sehingga garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengukuran kemiskinan adalah sebagai berikut (BPS):

1. Mendefinisikan sebuah indikator kesejahteraan
2. Menentukan standar minimum (garis kemiskinan)
3. Membuat ringkasan statistik dari populasi
4. Menggunakan metode *Head Count Index* untuk menghitung penduduk miskin pada tingkat nasional dan propinsi sebagai dasar untuk menghitung penduduk miskin pada tingkat kabupaten/kota.

Head Count Index merupakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Ukuran ini belum memberikan petunjuk seberapa miskin kaum miskin atau tingkat keparahan kemiskinan yang diderita. Jika terjadi perubahan kemiskinan pada kaum miskin, baik menjadi lebih miskin maupun menjadi lebih baik namun masih tetap dibawah garis kemiskinan, maka hanya dengan *Head Count Index* belum dapat diketahui perubahan yang terjadi.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha = 0, 1, 2$

$z = \text{GK}$

$y_i = \text{rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah GK (i = 1, 2, 3, \dots, q), } y_i < z$

$q = \text{banyaknya penduduk yang berada di bawah GK}$

$n = \text{jumlah penduduk}$

jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha = 1$, diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) dan jika $\alpha = 2$, disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* - P_2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

BAB III

PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi dilakukan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi pendapatan bagi segenap penduduk (Todaro dan Smith, 2006). Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan dua masalah krusial yakni kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kesenjangan ekonomi dalam hal ini yang dimaksud adalah adanya ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah yang diterima penduduknya.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan dapat dilakukan melalui pendekatan wilayah (pembangunan wilayah) atau pendekatan sektoral (pembangunan daerah). Pembangunan daerah lebih menekankan pada pendekatan daerah secara administrasi dan pendekatan sektoral, yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar perkotaan, antar perdesaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta pengembangan daerah seoptimal mungkin dengan memperhatikan dampak pembangunan.

Tidak meratanya distribusi pendapatan dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar. Apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi sosial yang dampaknya cukup negatif. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak hanya untuk mencapai target tingkat pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan pemerataan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Ketimpangan ekonomi antar daerah (kota-desa, pantai-bukan pantai, potensi industri-bukan potensi, dll) secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Falsafah pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah jelas tidak bermaksud membatasi arus modal. Arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek return atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarananya lebih lengkap.

Kemiskinan berkaitan erat dengan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan informasi yang jelas tentang pola konsumsi masyarakat. Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Menurut Ernest Engel (1857) bahwa persentase pengeluaran untuk makanan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Semakin kecil pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Oleh karena itu, pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di beberapa wilayah yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi.

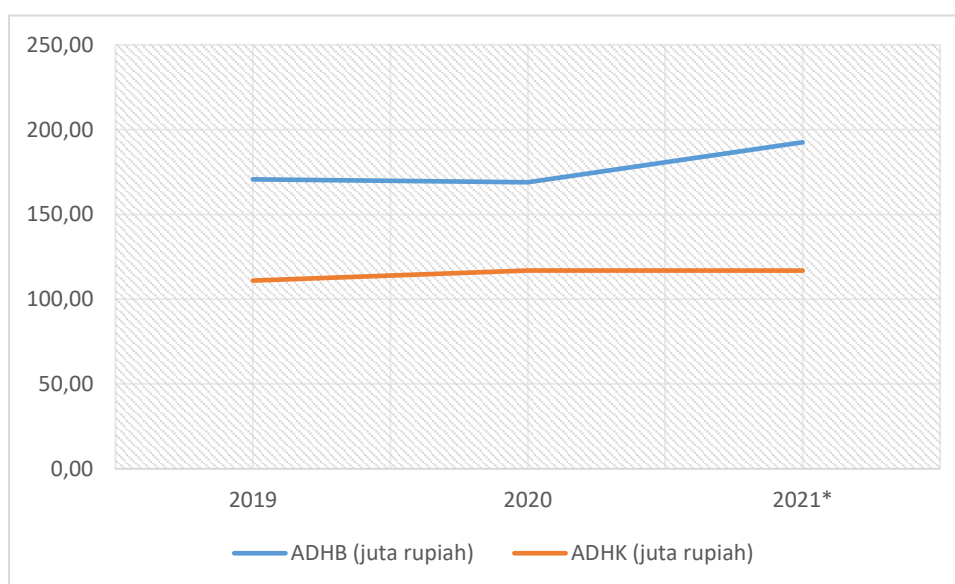
Pemerintah daerah juga memperhatikan akan program perlindungan sosial dimana tujuan utama yang diharapkan dengan terlaksananya perlindungan sosial adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan; meningkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi; serta, memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita didapat dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.

3.1 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan. PDRB per kapita merupakan pembagian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk pada suatu kurun waktu tertentu. Berdasarkan formulanya, PDRB per kapita dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menggambarkan tingkat rata-rata nilai tambah yang bisa diciptakan penduduk akibat aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Gambar 2. PDRB Per Kapita Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2021



Berdasarkan gambar 2 dan tabel 1 terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

PDRB per kapita mengalami peningkatan. Secara matematis, pertumbuhan PDRB per kapita atas harga berlaku lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Hal ini wajar karena harga berlaku mengandung faktor inflasi. Pada tahun 2021 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tumbuh 13,94 persen, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan mengalami kontraksi sebesar -0,05 persen.

**Tabel 1. PDRB per Kapita Kabupaten Siak,
2017 - 2021 (Juta Rupiah)**

Tahun	Atas Dasar	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2017	171,02	111,79
2018	176,40	110,11
2019	170,76	110,99
2020	168,98	116,94
2021	192,54	116,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

**Tabel 2. PDRB per Kapita Kabupaten/Kota
Menurut Harga Berlaku, Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita beberapa
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021**

No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	Jumlah Penduduk (jiwa)	PDRB per Kapita (juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)
1	Pekanbaru	126,556	994.585	127,244
2	Siak	89,855	466.668	192,539
3	Bengkalis	139,613	573.504	243,439
4	Rokan Hilir	80,610	646.791	124,630
5	Kepulauan Meranti	21,093	209.460	100,702
6	Rokan Hulu	42,187	570.952	73,890

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Riau, seperti pada Tabel 2 terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Siak berada di urutan kedua setelah Kabupaten Bengkalis. Ada dua hal yang secara matematis mempengaruhi besaran PDRB per kapita yaitu PDRB dan jumlah penduduk. Walaupun PDRB Kabupaten Siak lebih besar dibandingkan PDRB Kota Pekanbaru, namun karena jumlah penduduk Kabupaten Siak jauh lebih kecil dibandingkan

jumlah penduduk Kota Pekanbaru, maka PDRB per kapita Kabupaten Siak berada di atas PDRB per kapita Kota Pekanbaru.

PDRB per kapita Kabupaten Bengkalis relatif paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Riau, yaitu secara nominal berkisar dua kali lipat PDRB per kapita kabupaten yang lain. PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu adalah yang terendah, se-Provinsi Riau yaitu sebesar 73,890 juta rupiah, sedangkan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti masing-masing 124,630 juta rupiah dan 100,702 juta rupiah.

3.2 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan indikator mikro. Pengeluaran per kapita dihitung dari jumlah total pengeluaran rumah tangga selama satu bulan dibagi jumlah anggota rumah tangga. Pengeluaran per kapita merupakan hasil dari survei langsung pada rumah tangga yaitu Susenas. Misalnya pengeluaran rumah tangga dalam sebulan sekitar 3 juta rupiah, dengan jumlah anggota rumah tangga 5 orang, maka pengeluaran perkapita sekitar 600 ribu rupiah sebulan. Pengeluaran ini meliputi pengeluaran makanan dan non makanan.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, mayoritas penduduk Kabupaten Siak (61,58%) mempunyai pengeluaran per kapita dalam sebulan di atas 1 juta rupiah. Sedangkan persentase penduduk dengan pengeluaran perkapita dibawah 1 juta rupiah sebesar 38,42 persen. Kelompok pengeluaran perkapita dibawah 1 juta rupiah, sebaran penduduk terbesar ada di kelompok pengeluaran perkapita 800 ribu rupiah sampai 999.999 rupiah, yaitu sekitar 22,49 persen. Bila dirinci berdasarkan kelompok pengeluaran perkapita, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Persentase Penduduk menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Siak, 2021

Kelompok Pengeluaran Perkapita	% Penduduk
(1)	(2)
< 499.999	0,95
500.000 – 599.999	1,16
600.000 – 799.999	13,83
800.000 – 999.999	22,49
1.000.000 – 2.999.999	56,39
3.000.000 – 4.999.999	3,03
5.000.000 – 6.999.999	1,54
>= 7.000.00	0,62
Jumlah	100,00

Sumber : Susenas 2021, diolah

3.3 Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh konsumsi rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga akan semakin sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Secara umum persentase pengeluaran perkapita sebulan di Kabupaten Siak tahun 2021 lebih banyak untuk konsumsi makanan. Persentase pengeluaran makanan mencapai 50,93 persen sedangkan untuk non makanan mencapai 49,07 persen. Bila dilihat per kelompok pengeluaran, semakin tinggi kelompok pengeluaran, persentase pengeluaran makanan mengalami penurunan dan di sisi lain, pengeluaran non makanan mengalami kenaikan (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran di Kabupaten Siak, 2021

Kelompok Pengeluaran Perkapita	Makanan (%)	Non Makanan (%)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
< 499.999	61,84	38,16	100,00
500.000 – 599.999	58,11	41,89	100,00
600.000 – 799.999	58,44	41,56	100,00
800.000 – 999.999	58,64	41,36	100,00
1.000.000 – 2.999.999	49,75	50,25	100,00
3.000.000 – 4.999.999	43,79	56,21	100,00
5.000.000 – 6.999.999	45,28	54,72	100,00
>= 7.000.00	22,40	77,60	100,00
Total	50,93	49,07	100,00

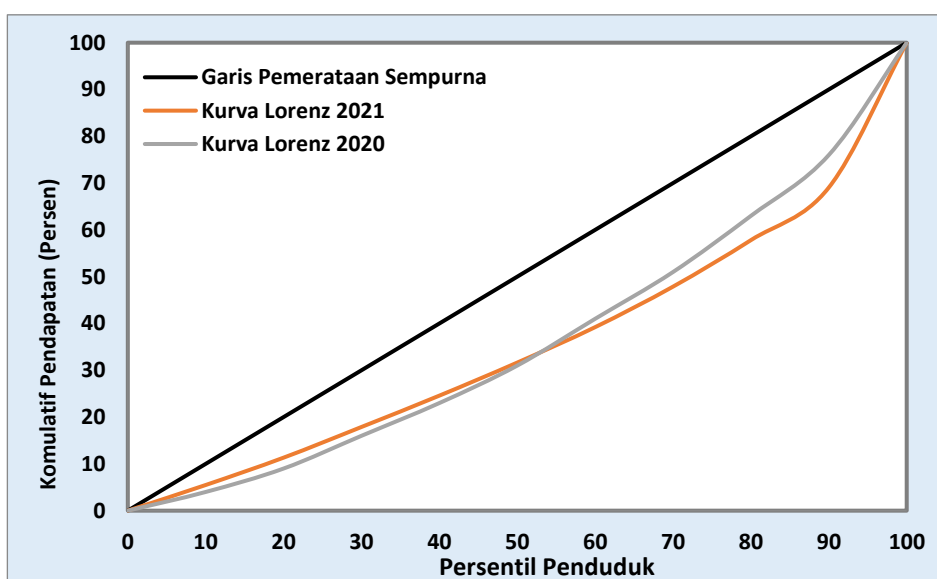
Sumber : Susenas 2021, diolah

Pada kelompok pengeluaran perkapita di bawah tiga juta rupiah pengeluaran lebih banyak digunakan untuk konsumsi makanan, tetapi untuk rumah tangga dengan pengeluaran Rp 3.000.000,- keatas komposisinya lebih banyak untuk konsumsi non makanan. Kondisi ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran untuk konsumsi makanan cenderung menurun dan konsumsi non makanan mengalami kenaikan.

3.4 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz Kabupaten Siak tahun 2020 dan 2021 disajikan pada gambar 3. Kurva ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Siak. Semakin dekat jarak kurva lorenz dengan garis diagonal menunjukkan distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin jauh jarak kurva lorenz dengan garis diagonal menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata atau semakin timpang.

Gambar 3. Kurva Lorenz Kabupaten Siak, 2020-2021



Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa Kurva Lorenz distribusi pendapatan penduduk yang Kabupaten Sleman Tahun 2020 lebih dekat dari garis diagonal dari pada kondisi Tahun 2021. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan pada tahun 2021 relatif lebih senjang dibandingkan tahun 2020.

3.5 Indeks Gini

Kurva Lorenz tidak bisa menjelaskan nilai kuantitatif ketimpangan distribusi pendapatan penduduk karena hanya menggambarkan secara visual melalui grafik. Tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif dapat diperoleh melalui Indeks Gini. Indeks Gini tahun 2019 tercatat 0,289 turun menjadi 0,279 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 0,295.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa berdasarkan dekomposisi wilayah, wilayah perkotaan memberikan andil terbesar pada besaran indeks gini. Hal ini dapat dipahami mengingat di wilayah perkotaan sebaran pendapatan penduduk relatif lebih lebar yang tentu saja berpengaruh pada besaran indeks gini. Sedangkan berdasarkan dekomposisi menurut pengeluaran, pengeluaran non makanan memberikan andil yang besar terhadap terbentuknya indeks gini.

Tabel 5. Indeks Gini dan Kriteria Tingkat Ketimpangan di Kabupaten Siak, 2019 – 2021

Uraian	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Gini	0,298	0,279	0,295
Kriteria	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Susenas 2021, diolah

Indeks Gini Kabupaten Siak selama periode 2018 sampai dengan 2020 selalu di bawah 0,300 yang berarti bahwa Kabupaten Siak termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria rendah. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah cukup dinikmati oleh penduduk secara merata, meskipun masih terdapat penduduk dengan penghasilan rendah sedang disatu sisi penduduk berpenghasilan tinggi, yang tinggal di wilayah perkotaan mengalami peningkatan.

Tabel 6. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Nasional, 2019 – 2021

Wilayah	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Siak	0,298	0,279	0,295
Riau	0,334	0,329	0,326
Nasional	0,380	0,381	0,384

Sumber : Susenas 2020, diolah

*) kondisi Maret

Tabel 6 menampilkan perbandingan antara nilai Indeks Gini Kabupaten Siak dan nilai indeks gini Provinsi Riau serta nasional. Secara umum dibandingkan dengan Propinsi Riau dan nasional, nilai indeks gini Kabupaten Siak pada tahun 2019-2021 relatif lebih rendah dibandingkan nilai indeks gini Provinsi Riau maupun nilai indeks gini nasional. Hal ini dapat diartikan tahun 2019-2021 pendapatan penduduk di Kabupaten Siak relatif lebih merata dibandingkan Provinsi Riau maupun secara nasional.

3.6 Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, indikator kesenjangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.

Tabel 7. Ketimpangan Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Siak, 2019-2021

Kelompok Penduduk	% Pendapatan		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
40% pendapatan terendah	24,76	22,36	22,28
40% pendapatan menengah	38,92	41,22	35,51
20% pendapatan tertinggi	36,32	36,42	42,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2019-2021, diolah

Pada tahun 2021, pada kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan terendah di Kabupaten Siak menikmati bagian pendapatan sebesar 22,28 persen dari total pendapatan

masyarakat. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan penduduk dalam kelompok ini persentasenya tergolong rendah (*low inequality*).

Kelompok 40 persen penduduk pendapatan menengah dan 20 persen penduduk pendapatan tinggi menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 persen penduduk terendah, yaitu masing-masing sebesar 35,51 persen dan 42,21 persen dari total pendapatan.

Kondisi yang tergambar dari kriteria Bank Dunia pada tahun 2020 menunjukkan porsi pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mengalami penurunan, sedangkan porsi pendapatan kelompok penduduk berpenghasilan tertinggi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang berarti kesenjangan semakin besar. Hal ini sejalan dengan kurva lorens ataupun nilai Indeks Gini yang mengalami kenaikan.

3.7 Garis Kemiskinan

Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Siak pada bulan Maret adalah sebesar 25,77 ribu orang atau 5,18 persen dari penduduk Kabupaten Siak (lihat Tabel 8). Dibandingkan dengan kondisi Bulan Maret tahun 2020 jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,09 persen.

Tabel 8. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, P_1 , dan P_2 di Kabupaten Siak, 2020 - 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan dalam ribu)	Penduduk Miskin		P_1	P_2
		Jumlah (ribu)	Persen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	473.128	25,38	5,09	1,27	0,45
2021	489.467	25,77	5,18	0,61	0,12

Sumber : Susenas 2020, diolah

Garis kemiskinan di Kabupaten Siak pada tahun 2021 mengalami peningkatan 3,45 persen dibanding dengan tahun 2020, yaitu menjadi sebesar Rp 489.467,- per kapita per bulan.

Tren garis kemiskinan selalu meningkat seiring dengan laju inflasi yang menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Siak pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu dari 25,38 ribu menjadi 25,77 ribu. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus dapat menurunkan tingkat kedalaman dan keparahannya. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menggambarkan ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin.

Pada tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan (P_1) Kabupaten Siak mencapai 0,61 dan indeks keparahan (P_2) mencapai 0,12. Tingkat kedalaman dan tingkat keparahan tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat kedalaman dan keparahan pada tahun 2020. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan merupakan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Artinya bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin berkurang, sedangkan penurunan pada nilai indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang ketimpangannya.

Tabel 9. Perbandingan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, P_1 , dan P_2 Kabupaten Siak dan beberapa Kabupaten/Kota di Riau, 2021

Wilayah	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin		P_1	P_2
		Jumlah (ribu)	Persen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pekanbaru	613.183	32,73	2,83	0,48	0,03
Siak	489.467	25,77	5,18	0,61	0,12
Bengkalis	604.925	37,66	6,64	0,72	0,13
Rokan Hilir	437.398	51,97	7,18	1,10	0,18
Kep. Meranti	542.599	48,50	25,68	4,46	1,22
Dumai	509.002	10,57	3,42	0,40	0,07
Rokan Hulu	551.351	74,73	10,40	1,51	0,36

Sumber : Susenas 2020, diolah

Tabel 9 menunjukkan perbandingan indikator kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. Garis kemiskinan di Kabupaten Siak adalah 489.467 rupiah perkapita per bulan. Artinya, bila ada penduduk dengan pengeluaran dibawah 489.467 rupiah perbulan maka penduduk tersebut termasuk penduduk miskin. Garis kemiskinan antar wilayah berbeda-beda, tergantung dari pola konsumsi dan harga barang di masing-masing wilayah. Garis kemiskinan tertinggi berada di Kota Pekanbaru sebesar 613.183 rupiah perkapita perbulan sedangkan terendah di Kabupaten Rokan Hilir 437.398 rupiah perkapita perbulan.

Jumlah penduduk miskin terbanyak di Wilayah Riau tahun 2021, yaitu di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 74,73 ribu orang, sedangkan terendah di Kota Dumai 10,57 ribu orang. Berdasarkan besaran persentase, penduduk miskin di Kabupaten Siak sebesar 5,18 persen, terendah ketiga setelah Kota Pekanbaru yang sebesar 2,83 persen dan Kota Dumai sebesar 3,42 persen. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai persentase penduduk miskin paling besar yaitu 25,68 persen.

Dari sisi kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan, Kabupaten Siak relatif lebih baik dibanding kabupaten yang lain. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan (P_2) Kabupaten Siak relatif lebih baik dibanding kabupaten lain dan Provinsi Riau.

BAB IV

PENUTUP

1. Pola konsumsi penduduk Kabupaten Siak menunjukkan bahwa pada tahun 2020 konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan yaitu 50,93 persen berbanding 49,07 persen.
2. Indeks Gini Kabupaten Siak Tahun 2021 sebesar 0,295 dan termasuk kategori ketimpangan rendah. Dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,279 Indeks Gini Kabupaten Siak mengalami kenaikan.
3. Berdasarkan kriteria Bank Dunia ketimpangan pendapatan di Kabupaten Siak termasuk rendah, dimana kelompok penduduk 40% pendapatan rendah dan 40% pendapatan menengah memperoleh 22,36 persen dan 35,51 persen dari total pendapatan penduduk Kabupaten Siak. Sementara itu kelompok penduduk 20% pendapatan tertinggi mengalami kenaikan. Kriteria Bank Dunia sejalan dengan Nilai Indeks Gini yang menyatakan terjadi kenaikan kesenjangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik.2011. “Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2011”, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik.1999. “*Metodologi Penghitungan Penduduk Miskin Tingkat Kabupaten/Kotamadya: Pendekatan dengan Susenas Kor*”, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik.2021. ”Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2021. Kabupaten/Kota”.Jakarta.
- BPS Kabupaten Siak 2020. “*Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak menurut Lapangan Usaha 2016-2020*”, Yogyakarta.
- BPS Kabupaten Siak. 2021. “*Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Siak 2020/2021*”,Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2021. ”Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia”, Jakarta
- Dumairy.1996. “*Perekonomian Indonesia*”, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Prijono Tjiptoherijanto, 1998, Kesenjangan, Jakarta
- Sukirno, Sadono.2006. “Makroekonomi : Pengantar teori Edisi 3” Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Todaro, Michael P, and Smith, Stephen C.2006. “*Economic Development 9th Edition*”. Addison Wesley, London.

Lampiran 1. Penghitungan Indeks Gini Berdasarkan Pendapatan Penduduk, 2021

Kelompok Pengeluaran	% jumlah Penduduk	Jumlah Pendapatan (juta rupiah)	Kumulatif pendapatan (juta rupiah)	% kumulatif pendapatan	Q(i-1)+Qi	Kol (3) X kol (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0,05	73.147,34	73.147,34	0,02	0,02	0,001
2	0,05	97.767,73	170.915,07	0,05	0,08	0,004
3	0,05	90.487,57	261.402,64	0,08	0,14	0,007
4	0,05	91.467,69	352.870,33	0,11	0,20	0,010
5	0,05	93.729,43	446.599,75	0,14	0,26	0,013
6	0,05	110.518,17	557.117,92	0,18	0,32	0,016
7	0,05	97.943,69	655.061,61	0,21	0,39	0,019
8	0,05	110.710,53	765.772,14	0,25	0,46	0,023
9	0,05	106.800,31	872.572,45	0,28	0,53	0,026
10	0,05	113.324,66	985.897,12	0,32	0,60	0,030
11	0,05	115.969,87	1.101.866,99	0,35	0,67	0,033
12	0,05	119.870,74	1.221.737,72	0,39	0,75	0,036
13	0,05	118.406,41	1.340.144,13	0,43	0,82	0,041
14	0,05	151.306,24	1.491.450,37	0,48	0,91	0,046
15	0,05	142.458,66	1.633.909,03	0,52	1,00	0,050
16	0,05	166.998,50	1.800.907,53	0,58	1,10	0,057
17	0,05	158.265,49	1.959.173,03	0,63	1,21	0,058
18	0,05	191.966,39	2.151.139,42	0,69	1,32	0,066
19	0,05	390.739,03	2.541.878,46	0,82	1,51	0,076
20	0,05	573.286,17	3.115.164,63	1,00	1,82	0,091
	1					0,705

GINI RATIO: 0.295

